

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN DENGAN SIMDA SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*
PEMERINTAH DI KABUPATEN PATI**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memeroleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah**



Oleh :

WIJAYANTI

NIM 1605046045

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Skripsi

A.n. Sdr. Wijayanti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Wijayanti

NIM : 1605046045

Judul : Pengaruh *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan SIMDA Sebagai Variabel *Moderating* Pemerintah Di Kabupaten Pati

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Semarang, 14 April 2020

Pembimbing I



Dr. ARI KRISTIN P., S.E., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II



WARNO P., S.E., M.Si
NIP. 19830721 201503 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185
Website: febi_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

PENGESAHAN

Nama : Wijayanti
NIM : 1605046045
Judul : **Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan SIMDA sebagai Variabel *Moderating* Pemerintah Di Kabupaten Pati.**

Telah diujikan oleh dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat baik, pada tanggal :


17 April 2020

Dan dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 17 April 2020

Mengetahui

Ketua Sidang,


Drs. Saekhu, M.H
NIP. 19690120 199403 1 004


Sekretaris Sidang,


Dr. ARI KRISTIN P., S.E., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Penguji I,


Johan Arifin, S.Ag., M.M
NIP. 19710908 200212 1 001

penguji II,


Choirul Huda, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002

Pembimbing I,


Dr. ARI KRISTIN P., S.E., M.Si
NIP. 19790512 200501 2 004

Pembimbing II,


WARNO P., S.E., M.Si
NIP. 19830721 201503 1 002



MOTTO

وَلَا كَهِنُومَا وَلَا تَحْزَنُومَا وَ أَنْتُمْ الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ❖

Artinya: “Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang yang beriman.”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan teruntuk kedua orang tua dan adik penulis, Ayah Gunadi dan Bunda Harti serta Adik Dewi pangestuti, teruntuk semua orang yang penulis sayangi yang tak henti-hentinya mengirimkan doa, semangat dan dukungan kepada penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran asli para ahli yang ada di dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 17 April 2020

WIJAYANTI

NIM. 1605046045

**PEDOMAN TRANSLITERASI
HURUF ARAB KE HURUF LATIN**

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga, dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ف = f	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = _	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Huruf Vokal

◌َ = a

◌ِ = i

◌ُ = u

C. Diftong

◌ِيَا = ay

◌ِيَا = aw

D. Syaddah (-)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya *الطِب* = *al-thibb*.

E. Kata Sandang (...ال)

Kata sandang) ... *ال* ditulis dengan *al-...* misalnya *الصناعة* = *al-shina 'ah*. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya *المعيشة*

الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dan untuk mengetahui seberapa besar SIMDA dalam *memoderating* pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. *Good governance* merupakan suatu pemerintahan yang baik dan sebagai jembatan awal penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam mencapai laporan keuangan yang bermutu, maka harus didasarkan pada standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan. Laporan keuangan yang berkualitas akan mempersempit tindakan untuk melakukan korupsi maupun kecurangan lainnya. Setiap tahunnya laporan keuangan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan pengeluaran opini atas laporan keuangan yang telah selesai diaudit.

Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah kuantitatif dan menggunakan data berlandaskan angket atau kuesioner. Sampel yang digunakan adalah *probability sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket pada Organisasi Perangkat Daerah terkait. Data dianalisis menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan analisis akhir yang terdiri atas analisis regresi sederhana, uji interaksi *moderating*, uji F, uji t (parsial), dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwasannya *good governance* berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dibuktikan dari signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,475 > 1,679$). Sedangkan SIMDA dapat “memperkuat” pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil tersebut dibuktikan dari grafik uji interak yang menggambarkan jika SIMDA menjadi variabel *moderating* pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci: *Good governance, SIMDA, Kualitas Laporan Keuangan*

ABSTRACT

This study aims to determine how much influence the good governance has on the quality of financial statements and to find out how much SIMDA in moderating the effect of good governance on the quality of financial statements. Good governance is a good government and as an initial bridge for the preparation of quality financial reports. In achieving quality financial statements, they must be based on established government accounting standards. Quality financial statements will narrow down actions to commit corruption or other fraud. Every year the financial statements will be audited by the Supreme Audit Board and the issuance of opinions on the financial statements that have been audited.

The method used in this study is quantitative and uses data based on questionnaires or questionnaires. The sample used is probability sampling. Data was collected through questionnaires in the relevant Regional Apparatus Organizations. Data were analyzed using data quality test, classical assumption test and final analysis consisting of simple regression analysis, moderating interaction test, F test, t test (partial), and coefficient of determination.

The results of the study found that good governance significantly influences the quality of financial statements. This is proven from significance is $0,000 < 0,05$ and $T_{count} > t_{table} (5,475 > 1,679)$. Whereas SIMDA can "strengthen" the effect of good governance on the quality of financial statements. These results are proven from the interaction test graphs that illustrate if SIMDA becomes a moderating variable the effect of good governance on the quality of financial statements.

Keywords: Good governance, SIMDA, Quality of Financial Statements

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh tanggung jawab. Disertai ucapan Alhamdulillah penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan SIMDA Sebagai Variabel *Moderating* “** tanpa halangan satu apapun.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari semua pihak yang memberikan bantuan sehingga tercapainya kelancaran dalam penulisan skripsi ini, peneliti hanya mampu menghaturkan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, dan III serta para Dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, SE., M.Si. Akt. CA, CPA, selaku kepala jurusan S1 Akuntansi Syariah dan Bapak Warno, SE., M.Si., selaku sekretaris jurusan S1 Akuntansi Syariah.
4. Ibu Dr. Ari Kristin P., SE., M.Si., selaku pembimbing I, dan Bapak Warno, SE., M.Si., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya untuk Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu dalam pembuatan administrasi untuk keperluan skripsi ini.
6. Pihak narasumber dan responden yang telah bersedia meluangkan waktunya.
7. Ayahanda Gunadi dan Ibunda Harti serta Adik Dewi Pangestuti yang selalu ananda cinta, terimakasih atas iringan do'a, nasihat, pengorbanan, ketulusan, kelembutan, dan curahan kasih sayangnya kepada penulis.

8. Nila Fauziah sahabat dari maba sampe sekarang yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Wulandari sahabat sambatku setiap hari yang selalu memberi semangat dan dorongan dalam mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
10. Asih Saputri teman sekamar dari kalimantan yang baik hati dan tidak banyak bicara telah menjadi tempat curhat mengenai skripsi ini.
11. Keluarga AKSB 2016 tercinta, Terima kasih atas dukungan dan bantuannya secara lahir maupun batin.
12. Teman-teman Magang di BPKAD Kabupaten Pati dan KKN posko 118 Batur yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT.
13. Teruntuk keluarga besar KMPP UIN Walisongo Semarang, serta teman-temanku yang tidak dapat penulis tulis satu persatu, terimakasih atas segalanya.

Semoga ini menjadi keberkahan sendiri bagi mereka yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini dengan sangat baik. Penulis menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Semoga Allah memberikan balasan atas kebaikan dan jasa yang telah penulis dapatkan. Semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi semua yang terlibat.

Semarang

Penulis,

WIJAYANTI

NIM. 1605046045

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	<i>i</i>
PENGESAHAN	<i>ii</i>
MOTTO.....	<i>iii</i>
PERSEMBAHAN	<i>iv</i>
DEKLARASI	<i>v</i>
PEDOMAN TRANSLITERASI PEDOMAN TRANSLITERASI	<i>vi</i>
ABSTRAK	<i>viii</i>
ABSTRACT.....	<i>ix</i>
KATA PENGANTAR.....	<i>x</i>
DAFTAR ISI.....	<i>xii</i>
DAFTAR TABEL.....	<i>xiv</i>
DAFTAR GAMBAR.....	<i>xv</i>
BAB 1 PENDAHULUAN.....	<i>1</i>
1.1 Latar Belakang.....	<i>1</i>
1.2 Rumusan Masalah.....	<i>6</i>
1.3 Tujuan Penelitian	<i>6</i>
1.4 Manfaat Penelitian.....	<i>6</i>
1.5 Statistika Penulisan	<i>7</i>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	<i>9</i>
2.1 Landasan Teori	<i>9</i>
2.1.1 <i>Good Governance</i>	<i>9</i>
2.1.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	<i>14</i>
2.1.3 Laporan Keuangan	<i>15</i>
2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan	<i>19</i>
2.2 Kerangka Pikir	<i>21</i>
2.3 Pengembangan Hipotesis.....	<i>22</i>
2.4 Penelitian Terdahulu	<i>24</i>
BAB III METODE PENELITIAN	<i>26</i>

3.1	Jenis dan Sumber Data	26
3.2	Populasi dan Sampel	26
3.3	Teknik Pengumpulan Data	27
3.4	Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian dan Pengukuran	28
3.5	Teknik Analisis Data	29
3.5.1	Uji Kualitas Data.....	29
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	30
3.5.3	Uji Hipotesis.....	32
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN		36
4.1	Gambaran Umum Obyek Penelitian	36
4.2	Karakteristik Responden	37
4.3	Statistik Deskriptif	41
4.4	Teknik Analisis Data	42
4.4.1	Uji Kualitas Data.....	42
1.	Uji Validitas.....	42
2.	Uji Reliabilitas	43
4.4.2	Uji Asumsi Klasik	44
1.	Uji Normalitas.....	44
2.	Uji Multikolinearitas.....	47
3.	Uji Autokorelasi	48
4.4.3	Uji Hipotesis.....	49
1.	Analisis Regresi Sederhana.....	49
2.	Analisis Uji Interaksi Variabel <i>Moderating</i>	50
3.	Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	53
4.	Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	54
5.	Koefisien Determinasi (R^2)	56
4.5	Pembahasan.....	56
BAB V PENUTUP		60
5.1	Simpulan	60
5.2	Keterbatasan Penelitian	60
5.3	Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran

Tabel 4. 1 Daftar Nama OPD di Kabupaten Pati

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Tabel 4. 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 6 Statistik Deskriptif

Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Instrumen

Tabel 4. 8 Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 4. 9 Uji Normalitas

Tabel 4. 10 Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4. 11 Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4. 12 Koefisien Regresi Sederhana

Tabel 4. 13 Hasil Uji Inetraksi

Tabel 4. 14 Hasil Uji Interaksi

Tabel 4. 15 Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 4. 16 Hasil Uji Parsial

Tabel 4. 17 Koefisien Determinasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas-Grafik Histogram

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas- Normal Probability Plot

Gambar 4. 3 Grafik Uji Interaksi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perjalanan dari waktu ke waktu akuntansi sektor publik telah terjadi perubahan yang relatif cepat. Di masa sekarang ini akuntansi pada lembaga publik lebih diawasi dan diperhatikan secara sungguh-sungguh, sehingga informasi keuangan lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada masa sebelumnya. Lembaga publik di masa sekarang lebih ditekankan pada informasi yang efektif, memerhatikan nilai ekonomis, serta dampak yang dihasilkan dari aktivitas yang telah dilakukan oleh lembaga publik tersebut. Adanya ketentuan tersebut mau tidak mau lembaga publik harus menerima dan berusaha untuk mempelajari ilmu tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan yang baik (*good governance*) merupakan tema yang masih terangkat dalam tata kelola administrasi pemerintahan. Model pengelolaan yang masih kolot pada pemerintahan tidak sebanding dengan susunan masyarakat dewasa sekarang. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang mengarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.¹

Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sulawesi Barat Dr. Wahyun Mawardi mengharapkan bahwa Jokowi-Ma'ruf harus mengayomi kedaulatan tanah air dari asing maupun domestik yang mengakibatkan kekayaan Indonesia tidak mampu dimanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Beliau juga mengatakan bahwa Jokowi-Ma'ruf juga harus mampu menciptakan *good governance* agar pemerintahan bersih dan pemerintah untuk kepentingan rakyat.²

¹ Diana Sari, "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", Jurnal Perkembangan Peran Akuntansi Dalam Bisnis Yang Profesional, 2012, hal. 718.

² Diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2019/10/21/ini-harapan-ketua-muhammadiyah-sulbar-kepada-jokowi-maruf/> pada 20 Januari 2020 pukul 21.00.

Salah satu cara terwujudnya *good governance* yaitu suatu pemerintahan dapat menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah diharuskan mengikuti standar akuntansi yang berlaku. Prinsip yang diterapkan oleh standar akuntansi dalam tata kelola keuangan daerah yang baik merupakan suatu keharusan yang diterapkan diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan.³

Pada awal tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah terkhususnya keperluan dalam kesesuaian data yang dikumpulkan. Pemeriksaan tersebut sangat penting bagi pemerintah karena dengan adanya audit tersebut negara dapat mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukan oleh organisasi daerah dalam menggunakan anggaran negara. Beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan mempraktikkan aturan *reward and punishment* pada pemerintah daerah. Terdapat tiga macam kriteria dalam aturan antara lain daerah telah menjalankan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian.⁴

Pada saat menyusun laporan keuangan sektor publik harus sesuai pedoman standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian diperbarui dengan keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah

³ Renny Novsellia Sihite dan Holiawati, "Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan", Jurnal Aset, Vol 9 No. 2, 2017, hal. 82.

⁴ M Rayindha Prasatya Yang dan I Wayan Suartana, "Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kinerja Pemerintah Daerah", E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 21 NO. 2, 2017, hal. 1351.

daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua.⁵

Tabel 1. 1
Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Opini

No	Entitas	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1.	Kab Boyolali	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab Brebes	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
3.	Kab Pati	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab Rembang	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
5.	Kab Blora	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: <https://semarang.bpk.go.id/>

Opini yang disampaikan pada LKPD (Laporan Keuangan Perangkat Daerah) merupakan gambaran atas mutu pertanggungjawaban keuangan dalam melaksanakan APBD. Meningkatnya persentase pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) diakibatkan adanya pembaharuan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintahan daerah dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan. LKPD yang belum memperoleh opini WTP (masih WDP dan TMP) tahun 2013 pada umumnya laporan keuangan masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

⁵ Putra Mhd Nazrin, "Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", JOM Fekon, Vol 4 No. 1, 2017, hal. 1700.

- Penatausahaan persediaan
- Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap
- Penatausahaan kas
- Penatausahaan piutang pajak dan retribusi
- Penyajian saldo investasi non permanen dana bergilir
- Realisasi belanja barang dan jasa

Peningkatan opini terjadi pada kurun waktu empat tahun terakhir (2015-2018) Pemerintah Kabupaten Pati memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Adanya peningkatan opini ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Pati dapat mempertahankan opini tersebut dan meningkatkan kompetensi dalam mengelola aset serta melakukan perbaikan kinerja di dalam pemerintahannya khususnya mengenai laporan keuangan.⁶ Keadaan tersebut menguraikan kinerja keuangan pada Kabupaten Pati tengah mengalami suatu persoalan. Sementara itu, berlandaskan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal (4) mengenai keuangan daerah wajib dilakukan pengelolaan yang tidak menyalahi ketetapan, taat pada susunan undang-undang yang diberi ketetapan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab, serta memerhatikan hukum peradilan, ketaatan, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menginginkan meningkatnya kinerja keuangan dari tahun sebelumnya.⁷

Untuk mendukung dan memaksimalkan manajemen daerah pada implementasi standar akuntansi berbasis akrual, BPKP telah mengembangkan aplikasi komputer dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).⁸ Penerapan SIMDA dikenalkan oleh (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) BPKP guna membantu pengelolaan keuangan daerah di tingkat

⁶ IHPS II TAHUN 2014, hal. 83-85.

⁷ Riawan, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang Dimoderasi dengan SIMDA pada SKPD Kabupaten Buton Utara", JESP, ISSN (P) 2086-1575 E-ISSN 2502-7115, Vol 8 No. 1, 2016, hal. 52.

⁸ Arif Fajar Wibisono, "Efektivitas Peran BPKP dalam Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)", Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, ISSN: 2088-0685, Vol 7 No. 1, 2017, hal. 952.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai entitas akuntansi, serta diharapkan dapat memberikan manfaat lebih kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.⁹ Diterapkannya program aplikasi SIMDA memiliki tujuan pertama, menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik. Kedua memperoleh informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan. Ketiga mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan keempat memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.¹⁰

Walaupun pemerintah di Kabupaten Pati telah mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, namun adanya permasalahan mengenai laporan keuangan tersebut menjadi perhatian serius karena menunjukkan kurangnya itikad baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para praktisi akuntansi sektor publik untuk menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sehingga menurunnya kredibilitas pemerintah, baik di mata rakyat maupun di mata investor yang diharapkan dapat memajukan perekonomian daerah.¹¹ Persoalan kronis yang menyebabkan buruknya pengelolaan dan pengaturan pemerintahan diakibatkan oleh rusaknya mental dan moralitas aparatur negara serta sistem pengendalian pemerintahan yang lemah karena ketiadaan kepastian dalam hukum.¹²

Laporan keuangan yang memiliki kualitas baik yaitu dengan melihat pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat strata

⁹ Rahmatia Azzindani dkk, "Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan Sap Terhadap Kualitas LKPD Lombok Tengah", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, ISSN: 2302-8556, Vol 27 No. 1, 2019, hal.421.

¹⁰ Wibisono, *Efektivitas...*, hal. 952.

¹¹ Tuti Herawati dan Defi Nopianti, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, STAR-Study & Accounting Research, ISSN: 1693-4482, Vol XIV No. 2, 2017, hal. 34.

¹² Muhammadong, *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*, Makassar: Edukasi Mitra Grafika, 2017, hal.69.

penilaian laporan keuangan dari hasil Pemeriksa Keuangan.¹³ Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disampaikan kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang mana sebagai auditor independen yang akan mengaudit laporan keuangan pemerintah guna untuk mengetahui tingkat kualitas informasi yang dimiliki oleh LKPD tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengambil judul “**Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan SIMDA sebagai Variabel *Moderating* Pemerintah di Kabupaten Pati**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, adapun urumusan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan?
2. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan SIMDA sebagai variabel *moderating*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Untuk menganalisis SIMDA sebagai variabel *moderating* antara *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berlandaskan uraian latar belakang di atas, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

¹³ Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY”, Jurnal Nominal, Vol VI No. 2, 2017, hal. 15.

¹⁴ Raja Yoga Gustika Armel, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”, JOM Fekon, Vol 4 No. 1, 2017, hal. 106.

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan penelitian mengenai akuntansi syariah yang terdapat pada Organisasi Perangkat Daerah dan untuk pengembangan pengetahuan serta wawasan yang dimiliki oleh penulis.

b. Bagi Lembaga

Memberikan informasi lebih mengenai *good governance* dengan memberikan pengetahuan tentang ayat-ayat yang sesuai dengan sikap dan tata tertib penyusunan laporan keuangan.

c. Bagi Pendidikan

Sebagai sumbangan pemikiran untuk memperkaya teori dan konsep serta ilmu pengetahuan mengenai Akuntansi Syariah. Ilmu pengetahuan tersebut khususnya tentang penyusunan laporan keuangan pada bagian pemerintahan di kabupaten pati.

1.5 Statistika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dimaksudkan agar penelitian ini lebih mudah dipahami dan menjadi lebih teratur. Sistematika terdiri atas bab satu sampai lima dengan penjelasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I, penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II, penulis menjelaskan mengenai landasan teori penelitian, kerangka pikir, pengembangan hipotesis, dan penelitian terdahulu. Teori yang dijelaskan meliputi teori tentang *good governance*, teori sistem informasi akuntansi manajemen, teori tentang laporan keuangan, serta penjabaran atas kualitas laporan keuangan pada sektor pemerintahan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB III, penulis menjelaskan dan menjabarkan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain jenis dan sumber penelitian, populasi dan sampel yang dipilih, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran, dan yang terakhir teknik analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV, penulis mulai melakukan pengolahan data. Adapun penjabaran isi dari bab ini yaitu gambaran umum obyek penelitian , analisis data, dan selanjutnya adalah pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB V, penulis membuat kesimpulan atas penelitian yang telah dilaksanakan, menguraikan beberapa keterbatasan penelitian ini, dan menyantumkan saran bagi peneliti selanjutnya maupun bagi lembaga terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Good Governance*

Semua praktik keuangan dan pengelolaan kelembagaan hanya didasari oleh kepercayaan (*Trust Agency*) tanpa memiliki sistem untuk mewujudkan kepercayaan tersebut kepada masyarakat. I *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik.¹⁵

Pengertian *good governance* adalah suatu pengelolaan urusan pada lembaga publik. *World Bank* menyampaikan definisi *governance* selaku “*the way state power is used in managing economic and sosial resources for development of society*”. Sedangkan, *United Nation Development Program* (UNDP) mengartikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Dengan demikian, *World Bank* condong pada bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan atas sumber daya sosial dan ekonomi demi keperluan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP condong pada sudut politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola suatu negara. Apabila berpedoman dari *World Bank* dan UNDP, sektor publik bertujuan untuk melahirkan *good governance*.¹⁶

World Bank mengartikan *good governance* merupakan suatu pengaturan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sesuai kaidah demokrasi, menghindari salah penempatan dana investasi, dan mencegah korupsi, mengoperasikan dana anggaran yang sesuai, serta

¹⁵ Warno, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) Dalam Penerapan Uu Pengelolaan zakat No. 23 Tahun 2011 Pada Lembaga Pengelolaan Zakat”, Jurnal STIE Semarang, Vol 8 No. 2, 2016, hal. 174.

¹⁶ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2002, hal. 17.

menciptakan *legal and political framework* untuk berdirinya suatu aktivitas.

Setidaknya terdapat sembilan indikator yang digunakan dalam pencapaian *good governance* menurut UNDP:

1. *Participation*. Masyarakat ikut terlibat dalam penentuan kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of law*. Berpedoman pada hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*. Kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang memiliki kaitan dengan kepentingan publik dan diperoleh secara langsung oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*. Instansi pemerintah reaktif dalam melakukan pelayanan terhadap *stake holder*.
5. *Consensus orientation*. Mengutamakan keperluan masyarakat yang lebih kuat.
6. *Equity*. Kesempatan yang sepadan pada setiap masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and effectiveness*. Dalam mengelola keuangan sektor publik harus dapat memilih cara yang benar dengan sumber daya minimal namun menghasilkan data yang bermutu.
8. *Accountability*. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan.
9. *Strategic vision*. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Berlandakan sembilan karakteristik di atas, setidaknya ada tiga karakteristik yang dapat diterapkan pada akuntansi sektor publik yaitu menciptakan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money (economy, efficiency, and effectiveness)*.¹⁷

Menurut PP No. 101 Tahun 2000 menerangkan definisi *good government governance* adalah “kepemerintahan yang mengemban, menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.¹⁸ *Good governance* dapat diartikan sebagai kepengurusan manajemen pembangunan yang bersatu dan mempunyai tanggungjawab sesuai aturan demokrasi secara efisien, meminimalisasi kesalahan penempatan dana investasi dan penanggulangan korupsi baik, menerapkan ketaatan anggaran serta menciptakan *legal political frame work* untuk berkembangnya aktifitas usaha, sementara itu birokrasi di daerah masih belum kuat. Kondisi tersebut, diperlukan adanya keraguan pada pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.¹⁹

Birokrasi pemerintah menjadi unsur *governance* yang tertua di karenakan telah melibatkan prinsip *governance* dari awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadi lembaga terlama dengan nilai-nilai yang kuat, birokrasi di pemerintah sampai sekarang ini masih memberikan peran besar dalam penyelenggaraan *governance*. Sosok dan perilaku birokrasi yang mencerminkan nilai dan tradisi baru praktik *good*

¹⁷ Ibid,..., hal. 18.

¹⁸ Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin, “Pengaruh Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO, hal. 108.

¹⁹ Mia Oktarina, Kharis Raharjo, dan Rita Andini, “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang”, Journal of Accounting, Vol 2 No. 2, 2016, hal. 3-4.

governance dapat mendorong perubahan yang berarti dalam kehidupan pasar dan masyarakat sipil.²⁰

Good governance merupakan salah satu persoalan muamalah (aturan tentang manusia dengan manusia), dan nas-nas yang berkaitan dengannya sebagian besar dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang diidentifikasi dengan *zanni*. Dengan demikian, *good governance* merupakan kajian yang bersifat *zanni*, sehingga keberadaannya dapat dikembangkan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia tidak terlepas dari tuntutan tempat dan waktu.²¹

Hakikat *good governance* dalam pandangan fiqih, belum ditemukan landasan hukum yang sesuai. Namun, terdapat ayat yang menerangkan adanya persoalan *good governance* dalam ajaran Islam. hal itu dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam surah al-Hajj/ QS. 224:41: yaitu;

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”

Ayat tersebut mengindikasikan adanya persoalan *good governance* dalam pandangan fikih, karena penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan dengan berorientasi pada (1) penciptaan suasana

²⁰ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014, hal. 37-38.

²¹ Muhammadong, *Good...*, hal.70.

kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaninya dapat disimbolkan dengan penegakan sholat, (2) penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dapat dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, (3) penciptaan stabilitas politik dapat diilhamkan dengan tindakan amar ma'ruf nahi munkar. Dengan demikian ayat tersebut merumuskan *good governance* dengan tiga aspek, yaitu; (1) *spiritual governance*, (2) *economic governance*, (3) *political governance*.²²

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ ، أَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ ،
 نَا يُّوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ ، نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنَ أَيُّوبَ ، عَنَ نَافِعِ ، عَنَ
 ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ
 عَنَ رَعِيَّتِهِ ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْئُولٌ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ
 مَسْئُولٌ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ
 وَهُوَ مَسْئُولٌ ، فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنَ رَعِيَّتِهِ » أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ،
 أَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي ، نَا عَارِمُ ،
 نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنَ أَبِي الرَّبِيعِ ،
 وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ، عَنَ عَارِمِ

Artinya:

“Diceritakan dari Abu Hasan Ali bin Muhammad al-Muqri’, saya Hasan bin Muhammad bin Ishaq, saya Yusuf bin Ya’qub, saya Abu Robi’, saya Hamad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi’, dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang penguasa (kepala pemerintahan) adalah pemimpin bagi rakyatnya yang akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya, maka masing-

²² Ibid..., hal. 86.

*masing dari kalian semua adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya.” Diceritakan oleh Abu Abdullah al-Hafidz, saya Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Shofar, saya Ismail bin Ishaq al-Qodzi, saya ‘Arim, saya Hamad bin Zaid, maka dikatakan dengan sanad sepadannya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Hadis Shahih, dari Abi Robi’, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Arim’.*²³

2.1.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat diartikan sebagai sistem yang bisa membantu manajemen dalam mengumpulkan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen.²⁴

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 mengenai Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban mengembangkan dan menggunakan perkembangan teknologi informasi demi kemudahan dan kecepatan dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan dalam mengambil keputusan pada sebuah instansi. Oleh sebab itu, penerapan sistem informasi manajemen sangat diperlukan organisasi daerah dikarenakan dapat meningkatkan kinerja keuangan.²⁵

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) bertujuan mempermudah mengelola maupun menyusun pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Diterapkannya aplikasi SIMDA supaya pemerintah daerah mampu melaksanakan kinerjanya dengan mudah dan efisien untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Aplikasi SIMDA bertujuan

²³ Imam Baihaqi, *Syu'ibul Iman Lilbaihaqi*, Bab: Keutamaan Pemimpin yang Adil, beirut: Maktabah Syamilah.

²⁴ Wibisono, *Efektivitas...*, hal. 954

²⁵ Riawan, *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia...*, hal.53.

mendukung pemerintahan daerah saat melaksanakan kegiatan penilaian kinerja keuangan daerah.²⁶

Adapun indikator yang ada dalam Sistem informasi Manajemen daerah (SIMDA) antara lain:

1. Akurat, ketepatan proses pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta, ketepatan informasi yang dihasilkan.²⁷
2. Kemudahan, pemahaman mengenai kemudahan dalam pengoperasian diartikan seseorang berkeyakinan jika dalam menggunakan aplikasi SIMDA adalah hal yang mudah dan tidak membutuhkan usaha lebih bagi penggunanya. Dasar kemudahan dalam menggunakan aplikasi SIMDA antara lain mudah dalam mempelajari, mudah dalam mengerjakan, meningkatkan keterampilan, mudah untuk mengoperasikannya.
3. Kemanfaatan, suatu bentuk keyakinan seseorang bahwasannya menggunakan aplikasi SIMDA akan memberikan peningkatan kinerja. Pengambilan dasar kemanfaatan sistem adanya keterkaitan dengan teknologi komputer pada seseorang dapat diprediksi dari sikap perhatiannya terhadap teknologi tersebut misalnya keinginan menambah *software* pendukung, motivasi untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain.²⁸

2.1.3 Laporan Keuangan

A. Pengertian

²⁶ Ibid..., hal. 53.

²⁷ Harmadhani Adi Nugraha dan Yuli Widi Astuti, "Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)", Jurnal Akuntansi Aktual, Vol 2 NO. 1, 2013, hal. 27.

²⁸ Fuad Budiman dan Fefri Indra Arza, "Pendekatan *Technology Acceptance Model* dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah", Jurnal WRA, Vol 1 No.1, 2013, hal. 95.

Laporan keuangan disusun oleh manajemen. Oleh sebab itu, pada teori keagenan, diungkapkan bahwasannya manajemen mempunyai informasi lebih mengenai perusahaan. Secara tidak langsung, seorang manajer mempunyai kesempatan luas melakukan perbuatan guna memperoleh keputusan akuntansi sesuai keperluan perusahaan tersebut.²⁹ Akuntansi dapat dipandang sebagai seni, ilmu, ataupun teknologi. Komponen terpenting dalam suatu organisasi adalah hasil dari laporan keuangan. Negara mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan pertanggungjawaban terhadap publik, namun hal tersebut menyebabkan adanya keterkaitan bagi manajemen di sektor publik untuk menyampaikan informasi tersebut kepada publik dalam bentuk laporan keuangan.³⁰

Institute of Management Accountants (IMA), organisasi profesi akuntan manajemen yang berbasis USA, pada tahun 1981 memberikan arti akuntansi manajemen merupakan suatu pemrosesan dalam mengidentifikasi, pengikhtisaran, akumulasi, analisis, penyiapan, penginterpretasian, dan penyampaian informasi keuangan yang dipakai oleh manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin penggunaan sumber daya secara tepat dan akuntabel.³¹

B. Tujuan

Secara umum, laporan keuangan sektor pemerintah mempunyai tujuan yang sama yaitu:

1. Menyampaikan keterangan bagi pemakai laporan keuangan yang digunakan sebagai pandangan pembentukan kebijakan ekonomi, sosial, dan politik;

²⁹ Novia Megarani, dkk. "The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index", *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, Vol 1 No. 1, 2019, hal. 140.

³⁰ Mardiasmo, akuntansi..., hal. 159.

³¹ Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UII Press, 2016, hal. 30.

2. Memperlihatkan keterlibatan dan pertanggungjawaban publik;
3. Menyampaikan keterangan sebagai bahan pertimbangan kinerja manajerial dan organisasi.

C. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Sama halnya dengan pemerintah pusat, laporan keuangan untuk lingkup pemerintah daerah meliputi laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah dan laporan konsolidasi dari seluruh laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian disusun dalam bentuk dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD tersebut meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan informasi keuangan yang disusun oleh SKPD antara lain Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan.³²

D. Dasar Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَا لَكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرَ ضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحَدَهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحَدَهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَفْطَسُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلْتَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

³² Mahmudi, *Akuntansi...*, hal. 154.

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ
 وَلَا يُضَارَ زَكَاتٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhaninya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan periksakanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita diperintahkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah, imbauan agar memberi sedekah dan pantangan mengerjakan riba, maka manusia diharuskan berusaha merawat dan menebarkan harta yang mereka miliki, tidak mengabaikannya sehingga sesuai dengan ketetapan yang diberikan Allah. Harta itu bukan

merupakan materi yang tidak disukai Allah dan bukan pula dicela oleh agama Islam. Allah telah menyatakan perintah pada hal tersebut, juga menyampaikan suatu petunjuk dan menentukan ketetapan-ketetapan umum serta dasar-dasar suatu aturan yaitu cara-cara mencari, memelihara, menggunakan, dan menafkahkan harta di jalan Allah. Dengan demikian, harta yang paling baik adalah harta yang sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

نِ عَمَّا الْمَالُ الصَّالِحِ (رواه أحمد والطبراني عن عمر و بن عاص)

Artinya: “Harta yang paling baik ialah harta kepunyaan orang saleh.” (Riwayat Ahmad dan at-Tabrani dari ‘Amr bin ‘Ās).

Ayat di atas bermakna jika Allah membenci cara yang salah dan akan mencela harta yang didapat dengan cara yang salah dan tidak sesuai ketentuan Allah serta harta yang berasal dari orang-orang yang menjadikan diri sendiri sebagai budak harta. Seluruh kehidupan, usaha, dan pikirannya dicurahkan untuk menumpuk harta dan memperkaya diri sendiri. karena itu timbullah sifat-sifat tamak, serakah, bakhil, dan kikir pada dirinya, sehingga dia tidak mengindahkan orang yang miskin dan terlantar.³³

2.1.4 Kualitas Laporan Keuangan

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

Berpedoman pada PP Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan jika laporan keuangan memiliki kualitas yang baik, maka secara otomatis informasi yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut akan

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jilid I, Juz 1-3, Jakarta: Widya Cahaya, 2015, hal. 433.

bermanfaat bagi pemakainya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.³⁴

Adapun indikator dan penjelasan mengenai prasyarat normatif dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yaitu:

1. Relevan, dikatakan relevan apabila suatu laporan keuangan mampu mempengaruhi keputusan penggunaannya sehingga dapat memberikan kontribusi pada SKPD saat melakukan kegiatan evaluasi di waktu lampau maupaun waktu sekarang dan untuk memperkirakan waktu yang akan datang.
2. Andal, suatu laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila isi suatu laporan keuangan terhindar dari kecurangan dan salah saji material, menampilkan bukti dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Bisa dibandingkan, suatu laporan keuangan dikatakan mampu dibandingkan apabila suatu laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode yang sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain pada umumnya. Perbandingan suatu laporan keuangan dengan laporan keuangan lain dapat dilakukan apabila menerapkan kebijakan yang sama.
4. Dapat dipahami, suatu laporan keuangan dikatakan dapat dipahami apabila informasi yang terdapat pada laporan keuangan dengan mudah dipahami bagi yang berkepentingan atau pengguna demi kemudahan pengambilan keputusan.

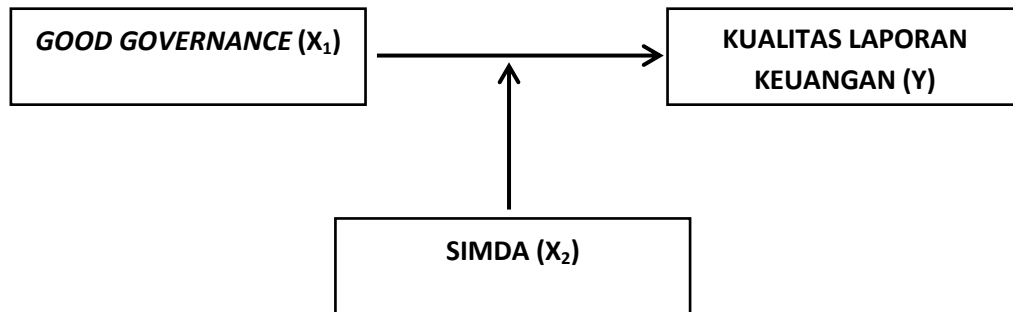
Laporan keuangan yang berkualitas dapat disusun dan disajikan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah yang efektif. Suatu

³⁴ Azlim, Darwanis, dan Usman Abu Bakar, "Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh", Jurnal Akuntansi, Vol 1 No. 1, 2012, hal. 4.

sistem dikatakan efektif jika *output* yang dihasilkan oleh suatu orang (kelompok) sesuai dengan tujuan yang diinginkan.³⁵

Kualitas informasi di dalam laporan keuangan yang buruk akan mempersulit pengguna di dalam mengambil keputusan. Selain itu, kualitas laporan yang buruk sebagai akibat dari rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh para pegawai di instansi pemerintah tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah.³⁶

2.2 Kerangka Pikir



Berdasarkan bagan di atas, diketahui bahwa untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik didahului dengan membenahi tata kelola pemerintah yang baik. Informasi keuangan adalah suatu wujud tanggungjawab pengelola keuangan. Peran pemerintah selaku pengelola uang rakyat wajib memperlihatkan tanggungjawabnya dalam bentuk laporan keuangan. Pertanggungjawaban tersebut dinyatakan secara terbuka sehingga sungguh menggambarkan akuntabilitas. Untuk mengukur akuntabilitas pemerintah, laporan keuangan tersebut wajib diperiksa terlebih dahulu oleh BPK sebagai auditor eksternal.³⁷ *Good governance* adalah variabel independen pertama

³⁵ PP No. 71 Tahun 2010, hal. 35-40.

³⁶ I Wayan Karsana dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana, "Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli", E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol 21 No. 1, 2017, hal. 653.

³⁷ Nopianti, "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah...", hal. 39.

(X1) yang mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Di mana kualitas laporan keuangan yang dimaksud merupakan kualitas atas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dan kualitas laporan keuangan tersebut merupakan variabel dependen (Y). Semakin baik sistem pemerintahannya, maka akan semakin berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

SIMDA menjadi variabel *moderating* yang “memperkuat” atau “memperlemah hubungan *good governance* pada kualitas laporan keuangan pemerintah. Hal tersebut disebabkan pentingnya SIMDA pada SKPD dalam penganggaran, di mana sistem informasi akuntansi daerah tersebut mampu menciptakan data secara cermat, mendorong kesuksesan dalam mengelola keuangan, mempunyai nilai manfaat dan berfaedah untuk mencetak informasi sehingga mampu menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik dan tidak memerlukan banyak biaya, efisien dan efektif apabila membandingkannya secara manual. Sehingga mengindikasikan apabila pemerintah daerah memanfaatkan aplikasi SIMDA dengan tertib akan menjadi “penguat” antara pengaruh *good governance* dalam memajukan kualitas laporan keuangan di pemerintahan.

2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan (rumusan masalah). Melalui pembuktian dari hasil penelitian maka hipotesis dapat benar atau salah, dapat diterima atau ditolak. Dengan demikian, hipotesis sementara yang dapat diambil pada penelitian ini yaitu:

1. Terdapat pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kabupaten Pati

Good governance merupakan pemerintahan yang baik untuk menciptakan kemajuan bangsa dan negara di masa yang akan datang,. Hal tersebut direalisasikan dengan adanya transparansi, partisipasi, penegakan

hukum, dan akuntabilitas. Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberi informasi keuangan dengan tujuan mengambil kebijakan ekonomi, sosial, dan politik bagi pihak yang memiliki kepentingan. Salah satu informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan tersebut adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi informasi paling penting atas semua informasi yang ada, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan harus berbobot guna mendapatkan keputusan berkualitas. Apabila suatu pemerintahan berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Budiasih mengenai pengaruh *good governance*, kompetensi SDM, dan sistem pengendalian intern pada kualitas laporan keuangan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara *good governance* dan kualitas laporan keuangan. Sebagaimana uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₁ : *Good governance* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Pati.

2. SIMDA *memoderating* pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan

SIMDA merupakan sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah. Adanya aplikasi SIMDA dimaksudkan untuk mempermudah pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Semakin bagus kualitas aplikasi SIMDA, sehingga dengan sendirinya akan menghasilkan informasi keuangan yang bermutu. Dengan dihasilkannya laporan keuangan yang berbobot, maka keputusan yang akan diambil oleh manajerial juga akan bermutu. Sehingga apabila SIMDA yang digunakan pada instansi pemerintahan bagus maka akan memperkuat pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Riawan mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia dan kualitas anggaran terhadap kinerja keuangan daerah yang dimoderasi dengan SIMDA

pada SKPD Kabupaten Buton Utara menunjukkan bahwa SIMDA memiliki pengaruh positif dan signifikan untuk *memoderating* kualitas anggaran pada kinerja keuangan daerah. Sebagaimana penjelasan tersebut, adapun hipotesis yang dapat diambil adalah:

H₂ : SIMDA dapat *memoderating* pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	I Gusti Ayu Gita Saraswati dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2019)	Pengaruh <i>Good Governance</i> , Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan.	Variabel Independen: <i>Good Governance</i> Kompetensi SDM Pengendalian Intern Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	a. <i>Good governance</i> memiliki pengaruh yang positif dan searah pada kualitas laporan keuangan di Pemerintahan Kota Denpasar. b. Kompetensi SDM memiliki pengaruh yang positif dan searah pada kualitas laporan keuangan. c. SPI memiliki pengaruh yang positif dan searah pada kualitas laporan keuangan.
2.	Rahmatia Azzindani, Endar Pituringsih, M. Irwan (2019)	Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD Lombok Tengah	Variabel Independen: Implementasi SIMDA Kinerja aparatur Pemerintah Daerah Penerapan SAP Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	a. Implementasi SIMDA berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. b. Kinerja aparatur pemerintah daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD. c. Penerapan SAP berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kualitas LKPD.
3.	Miranda Miryam	Pengaruh <i>Good Governance</i> dan	Variabel Independen:	a. <i>Good Governance</i> berpengaruh pada kualitas

	Maramis, Jenny Morasa, dan Heince R.N Wokas (2018)	Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado	<i>Good Governance</i> Sistem Akuntansi Keuangan Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	laporan keuangan pada Pemerintah Kota Manado. b. Sistem Akuntansi Keuangan tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Manado.
4.	Eko Slamet Wahyudi, Diana Sulianti K. Tobing, dan Handriyono (2018)	Pengaruh Kemampuan Teknik Personal, Pelatihan Operator Sistem Terhadap Kinerja Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Melalui Adopsi Layanan di Pemerintah Kabupaten Bondowoso	Variabel Independen: Kemampuan Teknik Personal Pelatihan Operator Sistem Variabel Dependen: Kinerja Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan Variabel Intervening: Adopsi Layanan	a. Kemampuan teknik personal system informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja SIMDA. b. Pelatihan pemakai sistem tidak berpengaruh terhadap kinerja SIMDA.
5.	Riawan (2016)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang Dimoderasi dengan SIMDA pada SKPD Kabupaten Buton Utara	Variabel Independen: Kualitas Sumber Daya Manusia Kualitas Anggaran Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah Variabel Moderating: SIMDA	a. Kualitas anggaran berpengaruh positif dan memiliki signifikansi pada kinerja keuangan daerah. b. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menghasilkan pengaruh positif secara signifikan dalam <i>memoderating</i> kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah. c. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menghasilkan pengaruh positif memiliki tingkat signifikansi dalam memoderasi kualitas anggaran terhadap kinerja keuangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang diserahkan langsung kepada responden.³⁸ Kuesioner yang disebarakan berupa daftar pernyataan tertulis kepada responden mengenai pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dengan SIMDA sebagai variabel *moderating*.

3.2 Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan hal fundamental yang harus peneliti perhatikan dengan saksama untuk mendapat kesimpulan atas hasil yang akurat pada daerah atau obyek penelitan.³⁹ Populasi dalam penelitan ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahan Kabupaten Pati. Jumlah OPD di pemerintahan Kabupaten Pati sebanyak 51 OPD.

b) Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai kriteria atau keadaan khusus dipakai pada penelitian. Sampel juga dapat diartikan suatu elemen populasi yang dipilih dengan memakai metode khusus sehingga diharapkan dapat mewakili populasi.⁴⁰ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 15 OPD di Kabupaten Pati. Hal tersebut dikarenakan dari 51 populasi yang ada hanya 15 OPD yang memiliki syarat cukup dijadikannya sampel, yaitu OPD yang mengerti akan kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya masyarakat Kabupaten Pati. Sedangkan sisanya, yaitu 36 OPD merupakan organisasi kecil di tingkat kecamatan yang memiliki

³⁸ Mulyasari, *Pengaruh...*, hal. 49.

³⁹ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014, hal. 145.

⁴⁰ Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hal. 76.

peran penting ditingkat kecamatan saja, sehingga tidak mencukupi syarat untuk dijadikan sampel. Sampel diambil secara acak (*probability sampling*) dengan *simple random sampling* yaitu metode pemungutan sampel dilaksanakan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada pada populasi. Pengambilan sampel pada bagian akuntansi pada setiap OPD. Penentuan besaran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, yaitu:

$$s = \frac{n}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

s = sampel

N = populasi

E = derajat ketelitian atau nilai kritis yang diinginkan⁴¹

Sehingga, perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah:

$$\begin{aligned} s &= \frac{45}{1 + 45 \cdot 0,05^2} \\ &= \frac{45}{1 + 45 \cdot 0,0025} = \frac{45}{1 + 0,1125} = \frac{45}{1,1125} = 40,4494 \approx 40 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan rumus slovin di atas, ternyata jumlah sampel sebesar 40 orang.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode mengumpulkan data merupakan suatu upaya untuk menempuh dan cara yang dipakai seorang peneliti untuk mendapat data yang akan menunjang penelitian tersebut.. Secara umum teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan teori, didapat dari kepustakaan (*Library Research*) dan dengan mengakses *website* dan situs-situs untuk memperoleh informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

⁴¹ Yusuf, *Metode...*, hal. 170.

2. Pengumpulan data penelitian, didapat dari kuesioner atau angket merupakan metode mendapatkan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertatap muka untuk melakukan tanya jawab). Kuesioner akan berisi daftar pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden.⁴² Pernyataan dalam kuesioner menggunakan *skala Likert*, di mana responden hanya memberikan persetujuan atau ketidaksetujuannya terhadap butir soal tersebut.

3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel Penelitian dan Pengukuran

Pengukuran harus memerhatikan pesan atau simbol yang akan diolah. Untuk melakukan pengukuran diperlukan sebuah batasan konsep serta berbagai teori yang mendasari pengukuran.

Tabel 3. 1

Definisi Operasional dan Pengukuran

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Pengukuran
1.	Good Governance	<i>Good governance</i> memiliki arti tata kelola dalam melayani publik secara efektif, berpedoman pada sistem yang adil, dan pemerintahan yang bertanggung jawab (<i>accountable</i>) kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. ⁴³	<i>Participation</i> <i>rule of law</i> <i>Transparency</i> <i>Responsiveness</i> <i>Consensus orientation</i> <i>Equity</i> <i>Efficiency and effectiveness</i> <i>Accountability</i> <i>Strategic vision.</i>	Skor 1 (sangat tidak setuju) Skor 2 (tidak setuju) Skor 3 (netral) Skor 4 (setuju) Skor 5 (sangat setuju)
2.	Sistem Informasi Manajemen	SIMDA merupakan aplikasi database yang memiliki tujuan memberi kemudahan dalam mengelola keuangan	Akurat Kemudahan	Skor 1 (sangat tidak setuju)

⁴² Saban Echdar, *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017, hal.298.

⁴³ Manuppan Bangun Tua, "Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian intern Terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai)", *Jom FEKON*, Vol 2 No.2, 2015, hal. 7.

	Daerah (SIMDA)	daerah pada Organisasi Perangkat Daerah. ⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut, mampu dibidang SIMDA merupakan perangkat yang terkonsolidasi dengan lengkap serta dapat menciptakan data secara kredibel dan benar sehingga dapat menghasilkan <i>output</i> laporan keuangan secara bermutu. ⁴⁵	Kemafaatan	Skor 2 (tidak setuju) Skor 3 (netral) Skor 4 (setuju) Skor 5 (sangat setuju)
3.	Kualitas Laporan Keuangan	Standar akuntansi pemerintahan menguraikan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah merupakan pemenuhan prasyarat normatif agar tercapainya tujuan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. ⁴⁶	Relevan Andal Dapat dibandingkan Dapat dipahami	Skor 1 (sangat tidak setuju) Skor 2 (tidak setuju) Skor 3 (netral) Skor 4 (setuju) Skor 5 (sangat setuju)

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Validitas merupakan kebenaran sebuah pemikiran bahwa pemikiran benar-benar valid. Validitas menunjuk pada seberapa jauh suatu alat mampu menghitung apa yang seharusnya diukur.⁴⁷ Pengukuran validitas mengacu pada seberapa baik jawaban terhadap suatu pertanyaan yang berhubungan dengan nilai sebenarnya dari suatu ide yang diukur.⁴⁸ Pengukuran dikatakan valid apabila tujuan dapat diukur secara nyata dan benar. Sedangkan, apabila tujuan tersebut menghasilkan pengukuran yang menyimpang, maka

⁴⁴ Wibisono, *Efektivitas...*, hal. 954.

⁴⁵ Azzindani dkk, *Pengaruh Implementasi SIMDA...*, hal. 423.

⁴⁶ Tua, *Pengaruh Good Governance...*, hal. 6.

⁴⁷ Eta Mamang S. Dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010, hal. 160.

⁴⁸ Eko Nugroho, *Prinsip-Prinsip Menyusun Kuesioner*, Malang: UB Press, 2018, hal. 93.

pengukuran disebut tidak valid. Penyimpangan pengukuran ini disebut dengan kesalahan (*error*) atau varian.⁴⁹

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen sudah baik. Reliabilitas suatu alat pengukur adalah derajat keajegan alat dalam mengukur apa saja yang diukurnya. Ungkapan yang menyatakan bahwa instrumen harus reliabel sebenarnya mengandung arti bahwa instrumen cukup baik sehingga mampu mengungkapkan data yang bisa dipercaya.⁵⁰ Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama.⁵¹

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji kenormalan bertujuan untuk memeriksa data pada suatu riset apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji kenormalan dilaksanakan dengan memakai tolok ukur *critical ratio skweness value* dengan besaran 2,58 dan nilai signifikan 99%. Data berdistribusi normal apabila besaran *critical ratio skweness* di bawah nilai absolut (kurang lebih) 2,58. Uji kenormalan bertujuan memperoleh data stempel yang bersumber dari populasi yang berdistribusi normal, ada beberapa teknik dalam pengujian kenormalan data, diantaranya: dengan kertas peluang normal, uji *chi-kuadrat*, uji *Liliefors*, dengan teknik *kolmogrov-smirnov*, dan dengan SPSS.⁵²

2. Uji Multikolinearitas

⁴⁹ Echdar, *Metode Penelitian Manajemen...*, hal. 310.

⁵⁰ Mamang S. Dan Sopiah, *Metodologi...*, hal. 163.

⁵¹ Echdar, *Metode Penelitian Manajemen...*, hal. 311.

⁵² Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, hal.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendapati ada tidaknya korelasi yang signifikan pada variabel independen. Apabila terdeteksi korelasi yang tinggi maka terdapat bagian yang sepadan dihitung pada variabel independen. Dengan demikian, hal tersebut tidak cukup dipakai dalam mematok kontribusi secara bersamaan variabel independen terhadap variabel dependen.⁵³

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bermaksud untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ ⁵⁴. Ada tidaknya autokorelasi dapat dicaca pada angka *Durbin-Watson* yang terlihat. **Uji *Durbin-Watson*** (DW Test) hanya berfungsi untuk autokorelasi tingkat satu dan mengibaratkan adanya *intercept* dalam analisis regresi dan tidak ada variabel lain di antara variabel penjelas. Adapun hipotesis yang akan dilakukan pengujian adalah:

$H_0 : \rho = 0$, maka hipotesis nolnya adalah tidak ada autokorelasi.

$H_a : \rho > 0$, maka hipotesis alternatifnya adalah ada autokorelasi positif.

Ketentuan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi yaitu:

1. Apabila angka *Durbin-Watson* di atas nilai batas (*upper bound, U*), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, sehingga tidak ada autokorelasi positif.
2. Apabila angka *Durbin-Watson* di bawah nilai batas bawah (*lower bound, L*), besaran autokorelasi di atas nol, sehingga terdapat autokorelasi positif.

⁵³ Dedek Andrian dkk, *Metodologi dan Aplikasi Statistik*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2019, hal. 81.

⁵⁴ Rizky Ages Purnawati, dkk, "Pengaruh Keahlian, Program pelatihan dan Pendidikan, Ukuran Organisasi, dan Formalisasi Pengembangan Sistem Terhadap Kinerja Sistem Informasi akuntansi (Studi Kasus PT Kusumahadi Santosa di Karanganyar)", *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol 14, Edisi Khusus, 2018, hal. 246.

3. Apabila angka *Durbin-Watson* terletak di antara batas atas dan batas bawah, maka tidak dapat disimpulkan⁵⁵.

3.5.3 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana dimaksudkan untuk memperoleh interaksi matematis yang diwujudkan pada persamaan antara variabel independen dengan variabel dependen dan hanya didasari oleh satu variabel independen.⁵⁶ Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Di mana:

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
 a = Nilai konstanta/ parameter *intercept*
 b = Koefisien Regresi
 X₁ = *Good Governance*
 e = *Standard Error*

2. Analisis Uji Interaksi Variabel Moderating

Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) dengan rumus persamaan sebagai berikut⁵⁷:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3(X_1X_2) + e$$

Di mana:

⁵⁵ Kuncoro, *Metode Kuantitatif...*, hal. 115.

⁵⁶ Rambat Lupiyoadi dan Ridho Bramulya I., *Praktikum Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2015, hal. 152.

⁵⁷ Lie Liana, "Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen", *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIKA*, Vol XIV No. 2, 2009, hal. 93.

- Y = Kualitas Laporan Keuangan
 a = Nilai konstanta/ parameter *intercept*
 b = Koefisien Regresi
 X₁ = *Good Governance*
 X₂ = SIMDA
 e = *Standard Error*

Pembuktian peran variabel *moderating* apakah variabel tersebut ”memperkuat” atau ”memperlemah” pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, maka dengan melihat grafik pada uji interaksi. Grafik tersebut akan menggambarkan bagaimana variabel *moderating* hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

3. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada hakikatnya untuk melihat apakah masing-masing variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan memakai tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$).⁵⁸

Cara melakukan uji F adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila nilai F di atas 4 maka H₀ dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, sedangkan hipotesis alternatif (H₁) diterima sehingga didapatkan masing-masing variabel bebas secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
2. Perbandingan antara nilai F_{hitung} dengan nilai F_{tabel}: bilamana nilai F_{hitung} > nilai F_{tabel}, maka hipotesis alternatif diterima sehingga diperoleh kesimpulan bahwasannya masing-masing variabel bebas

⁵⁸ Febriyani Moha dkk, ”Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan”, Jurnal EMBA, Vol 5 No. 2, 2017, hal. 1363.

secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.⁵⁹

4. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk memperlihatkan sejauh mana pengaruh masing-masing variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ($\alpha = 5\%$).⁶⁰

Cara melakukan Uji t adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Bilamana hasil *degree of freedom* adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 sehingga diperoleh kesimpulan bahwasannya masing-masing variabel bebas secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen.
2. Perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Bilamana t_{hitung} diperoleh hasil di atas nilai t_{tabel} , maka hipotesis alternatif diterima sehingga diperoleh kesimpulan bahwasannya masing-masing variabel bebas secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.⁶¹

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai koefisien determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R^2 yang rendah diartikan kecakapan masing-masing variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Pada intinya, koefisien determinasi (R^2) dipakai untuk memperkirakan sejauh mana kecakapan variabel bebas dalam memengaruhi variabel terikat.

Kekurangan dalam menggunakan koefisien determinasi yaitu bias pada total variabel bebas yang dimasukkan pada model. Jika ada

⁵⁹ Mudrajad kuncoro, *Metode Kuantitatif*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, edisi kelima, 2018, hal. 108.

⁶⁰ Moha dkk, "*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern...*", hal. 1363.

⁶¹ Kuncoro, *Metode Kuantitatif...*, hal. 107.

subsidi satu variabel bebas, nilai R^2 akan naik tanpa memerhatikan keterpengaruhannya variabel secara signifikan terhadap variabel terikat.⁶²

Dengan demikian, para peneliti menyarankan lebih baik memakai nilai *Adjusted R²* dalam menilai hasil regresi yang baik. Angka yang diperoleh dari *Adjusted R²* bisa meningkat atau menurun jika ada penambahan satu variabel bebas. *Adjusted R²* dapat bernilai negatif, walaupun R^2 senantiasa bernilai positif. Apabila *Adjusted R²* memiliki nilai negatif, maka nilainya dianggap nol, dikarenakan ada spesifikasi model yang salah. Apabila terdapat penambahan variabel independen yaitu prediktor yang baik, maka akan menjadikan nilai varians bertambah, dan nilai *Adjusted R²* akan meningkat. Namun sebaliknya, apabila tambahan variabel tidak menaikkan varians, maka nilai *Adjusted R²* akan menurun⁶³.

⁶² Ibid, ..., hal. 109.

⁶³ Ibid, ..., hal. 109.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten yang ada di Jawa Tengah dengan luas wilayah kira-kira kurang lebih 1.419,07 KM². Kabupaten Pati mempunyai sebuah julukan yaitu *Pati Bumi Mina Tani*. Di kabupaten ini terdapat 21 kecamatan, 5 kelurahan, dan 401 desa. Mayoritas penduduk di Kabupaten Pati mempunyai mata pencaharian sebagai seorang petani. Macam-macam jenis pertanian di Kabupaten pati seperti padi, ketela, jagung, dan bawang merah. Kabupaten Pati pertama kali dipimpin oleh Raden Tambranegara yang merupakan Adipati di Kadipaten Pesantenan dan Pati pada sekitar tahun 1300-an. Perbatasan yang ada di Kabupaten Pati antara lain Laut Jawa (utara), Kabupaten Rembang (Timur), Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan (Selatan), serta kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara (Barat).

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati. Keseluruhan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pati berjumlah 51. Responden yang dipilih dalam penelitian ini yaitu bagian keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan jumlah responden 48 orang. Pemilihan Organisasi Perangkat Daerah dalam pengambilan responden berjumlah 15 dikarena memilih Organisasi Perangkat Daerah yang berdekatan agar lebih memudahkan saat penyebaran maupun pengambilan kuesioner. Kuesioner diantarkan dan diambil langsung kepada responden. Responden mengembalikan 48 daftar pernyataan yang telah disebar ke 15 Organisasi Perangkat Daerah yaitu 100%, yang mengartikan seluruh responden memulangkan keseluruhan daftar pernyataan yang disebar dan terisi lengkap.

Adapun nama-nama OPD yang dijadikan sampel dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Daftar Nama OPD di Kabupaten Pati

No.	OPD	Responden
1.	Inspektorat Daerah	4 orang
2.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6 orang
3.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	3 orang
4.	Dinas Tenaga Kerja	2 orang
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3 orang
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan	3 orang
7.	Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata	3 orang
8.	Dinas Perhubungan	3 orang
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3 orang
10.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3 orang
11.	dinas Perumahan dan Kawasan Industri	3 orang
12.	Dinas Lingkungan Hidup	3 orang
13.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3 orang
14.	Dinas Pertanian	3 orang
15.	Dinas Kesehatan	3 orang

Sumber: data diolah, 2020.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang digunakan antara lain jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama bekerja, dan usia.

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 2**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

		jenis kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	24	50,0	50,0	50,0
	Perempuan	24	50,0	50,0	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Sumber: data diolah, 2020.

Bersumber pada hasil uji tersebut, menunjukkan jika responden dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 24 orang dan memiliki persentase 50%, sedangkan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 24 orang dengan persentase 50%. Oleh karena itu, responden yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan adalah seimbang antara laki-laki dan perempuan, karena sama-sama mempunyai persentase 50%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 3**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

		pendidikan terakhir			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	12	25,0	25,0	25,0
	S1	31	64,6	64,6	89,6
	S2	5	10,4	10,4	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan hasil uji di atas diperoleh total responden dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 12 orang dan persentase 25%,

responden dengan pendidikan terakhir S1 memiliki total 31 orang an persentase 64,6%, sedangkan responden dengan pendidikan terakhir S2 diperoleh total 5 orang dan persentase 10,4%. Sehingga, mayoritas responden yang menyusun laporan keuangan memiliki pendidikan terakhir S1.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

lama bekerja					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	<1 tahun	1	2,1	2,1	2,1
	1-<5 tahun	3	6,3	6,3	8,3
	5-<10 tahun	5	10,4	10,4	18,8
	10-<15 tahun	19	39,6	39,6	58,3
	>=15 tahun	20	41,7	41,7	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, menunjukkan bahwa responden yang bekerja kurang dari 1 tahun sebanyak 1 orang dengan presentase 2,1%, responden yang bekerja selama 1 tahun sampai kurang dari 5 tahun sebanyak 3 orang dengan presentase 6,3%, responden yang bekerja selama 5 tahun sampai kurang dari 10 tahun sebanyak 5 orang dengan presentase 10,4%, responden yang bekerja selama 10 tahun sampai kurang dari 15 tahun sebanyak 19 orang dengan presentase 39,6%, dan responden yang bekerja selama lebih dari sama dengan 45 tahun sebanyak 20 orang dengan presentase 41,7%. Sehingga yang berperan dalam penyusunan laporan

keuangan adalah responden yang telah bekerja selama lebih dari sama dengan 15 tahun.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden menurut Usia Saat Ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

		Usia			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<25 tahun	1	2,1	2,1	2,1
	25-<35 tahun	9	18,8	18,8	20,8
	35-<45 tahun	25	52,1	52,1	72,9
	>=45 tahun	13	27,1	27,1	100,0
	Total	48	100,0	100,0	

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa responden yang berusia kurang dari 25 tahun sebanyak 1 orang dengan presentase 2,1%, responden yang berusia antara 25 tahun sampai kurang dari 35 tahun sebanyak 9 orang dengan presentase 18,8%, responden yang berusia 35 tahun sampai dengan kurang dari 45 tahun sebanyak 25 orang dengan presentase 52,1%, dan yang terakhir responden yang berusia lebih dari sama dengan 45 tahun sebanyak 13 orang dengan presentase 27,1%. Jadi, mayoritas yang berperan dalam penyusunan laporan keuangan adalah responden yang berusia 35 tahun sampai dengan kurang dari 45 tahun.

4.3 Statistik Deskriptif

Tabel 4. 6
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Good Governance	48	29,00	45,00	39,0417	4,40482
SIMDA	48	27,00	45,00	39,3958	4,94110
Kualitas Laporan Keuangan	48	12,00	20,00	17,7500	2,02642
Valid N (listwise)	48				

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa statistik deskriptif pada masing-masing variabel, di mana nilai N atau jumlah data yang diteliti berjumlah 48 sampel. Menurut uraian berdasarkan tabel *descriptive* statistic pada variabel *Good Governance* memperlihatkan hasil minimal berjumlah 29, hasil maksimal berjumlah 45, dengan hasil mean (nilai rata-rata) 39,0417, serta mempunyai standar deviasi 4,40482. Selanjutnya variabel SIMDA memiliki hasil minimal berjumlah 27, hasil maksimal berjumlah 45, dengan hasil mean (nilai rata-rata) 39,3958, dan diperoleh standar deviasi 4,94110. Variabel terakhir yaitu kualitas laporan keuangan dengan nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 20, dengan mean (rata-rata) sebesar 17,7500, dan memiliki standar deviasi 2,02642.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mean tertinggi terdapat pada variabel SIMDA sebesar 39,3958, dan hasil mean terendah terdapat pada variabel kualitas laporan keuangan yaitu se besar 17,7500. Sedangkan standar deviasi tertinggi juga terdapat pada variabel SIMDA dengan niali 4,94110, sedangkan standar deviasi terendah juga terdapat pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 2,02642.

4.4 Teknik Analisis Data

4.4.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Pengujian validitas instrumen digunakan untuk menilai butir pernyataan dengan tujuan menaksirkan variabel yang akan diukur. Butir pernyataan pada kuesioner dapat dibilang valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nilai r_{tabel} 0,2845 yang diperoleh dari perhitungan $df = N - 2$ ($48 - 2$) = 46 dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,2845. Tabel validitas untuk semua variabel adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7

Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Good Governance (X₁)	X1.1	0,522	0,2845	Valid
	X1.2	0,881	0,2845	Valid
	X1.3	0,762	0,2845	Valid
	X1.4	0,839	0,2845	Valid
	X1.5	0,574	0,2845	Valid
	X1.6	0,831	0,2845	Valid
	X1.7	0,858	0,2845	Valid
	X1.8	0,838	0,2845	Valid
	X1.9	0,848	0,2845	Valid
SIMDA (X₂)	X2.1	0,741	0,2845	Valid
	X2.2	0,707	0,2845	Valid
	X2.3	0,710	0,2845	Valid

	X2.4	0,775	0,2845	Valid
	X2.5	0,763	0,2845	Valid
	X2.6	0,887	0,2845	Valid
	X2.7	0,893	0,2845	Valid
	X2.8	0,906	0,2845	Valid
	X2.9	0,881	0,2845	Valid
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Y.1	0,896	0,2845	Valid
	Y.2	0,910	0,2845	Valid
	Y.3	0,939	0,2845	Valid
	Y.4	0,935	0,2845	Valid

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.7 yang merupakan hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada masing-masing variabel mempunyai nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan valid dan bisa dilanjutkan pada analisis berikutnya.

2. Uji Reliabilitas

Kriteria menyebutkan jika nilai korelasi sama dengan atau lebih besar dari 0,80 maka butir-butir pernyataan reliabel⁶⁴. Apabila nilai yang diperoleh dari *Cronbach's Alpha* di atas 0,80 maka variabel tersebut adalah reliabel. Namun, apabila nilai *Cronbach's Alpha* di bawah 0,80 maka variabel tersebut tidak reliabel. Untuk membuktikan semua variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih lebih dari 0,80 dan reliabel, maka dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁶⁴ Jonathan Sarwono, *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2006, hal. 220.

Tabel 4. 8
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
<i>Good Governance</i>	0,911	0,80	Reliabel
SIMDA	0,909	0,80	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan	0,939	0,80	Reliabel

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, semua variabel yang terdiri atas *good governance*, SIMDA, dan kualitas laporan keuangan diperoleh hasil *Cronbach's Alpha* lebih > 0,80. Variabel *good governance* memperoleh hasil *Cronbach's Alpha* sebesar 0,911, variabel SIMDA memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,909, dan variabel kualitas laporan keuangan memperoleh hasil *Cronbach's Alpha* 0,939. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan reliabel.

4.4.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Ada tiga cara melakukan uji normalitas yaitu:

a. Cara Kolmogrov-Smirnov

Uji Kolmogrov-Smirnov bertujuan mengetahui distribusi data pada variabel yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak⁶⁵. Uji *Kolmogrov-Smirnov* dapat diketahui dengan cara melihat Asymp. Sig. (2-tailed) yang ada pada tabel. Untuk membuktikan apakah variabel berdistribusi normal atau tidak dapat dilihat pada tabel berikut:

⁶⁵ Andrian,dkk, *Metodologi...*, hal. 50.

Tabel 4. 9
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,31001278
	Absolute	,119
Most Extreme Differences	Positive	,119
	Negative	-,063
Kolmogorov-Smirnov Z		,828
Asymp. Sig. (2-tailed)		,500

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data diolah, 2020.

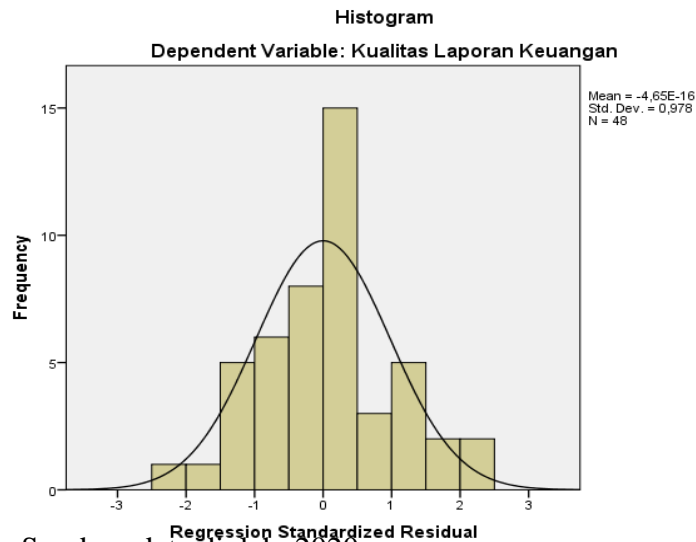
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,500 yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan semua variabel berdistribusi normal.

b. Cara Grafik Histogram

Kaidah membaca tabulasi histogram untuk memastikan data tersebut memiliki distribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat perbedaan antara data real dengan garis bagan yang dihasilkan dengan memerhatikan apakah garis tersebut mendekati normal atau benar-benar normal. Jika data real menghasilkan bagan tak simetris pada nilai rata-rata (mean) bahwa data tidak memiliki distribusi normal, serta sebaliknya⁶⁶. Grafik untuk membuktikan uji normalitas dapat dilihat pada gambar grafik hitogram berikut:

⁶⁶ Andrian,dkk, *Metodologi...*, hal. 50.

Gambar 4. 1
Hasil Uji Normalitas-Grafik Histogram



Sumber: data diolah, 2020.

Berlandaskan gambar histogram di atas, menggambarkan bahwa bagan histogram tersebut simetris terhadap mean. Oleh karena itu, maka penyebaran data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas.

c. Normal Probability Plot

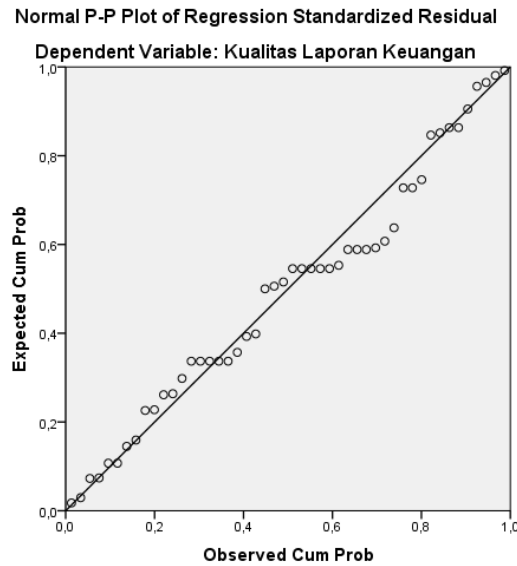
Cara normal *probability plot* yaitu membandingkan data real dengan data distribusi normal secara kumulatif. Data berdistribusi normal jika garis data real mengikuti garis diagonal⁶⁷. Jika ingin mengetahui ada tidaknya kenormalan, maka dapat dilihat pada titik-titik plotting yang ada pada *output* yang dihasilkan. Apabila titik tersebut mendekati atau berada disekeliling garis diagonal, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun, jika titik tersebut menjauhi garis diagonal, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, hasil uji

⁶⁷ Andrian,dkk, *Metodologi...*, hal. 50.

normal dengan cara *Probability Plot* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 2

Hasil Uji Normalitas- Normal Probability Plot



Sumber: data diolah, 2020.

Berlandaskan diagram *Probability Plot* di atas titik-titik plotting tersebar mengikuti dan mendekati garis diagonal. Berdasarkan pedoman dalam pengambilan keputusan untuk uji normalitas teknik *Probability Plot*, maka data tersebut berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi pada setiap variabel bebas. Multikolinearitas dapat diketahui dengan cara melihat nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Apabila didapat nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil dari uji multikolinearitas buktikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 10
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Good Governance	,661	1,512
	SIMDA	,661	1,512

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: data diolah, 2020.

Menurut tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa setiap variabel mempunyai angka *tolerance* > 0,10 dan memiliki angka VIF < 10. Variabel *good governance* mempunyai angka *tolerance* 0,661 sedangkan variabel SIMDA mempunyai angka *tolerance* sama yaitu 0,661. Variabel *good governance* dan SIMDA juga memiliki nilai VIF sama yaitu sebesar 1,512. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi diperlukan untuk mengetahui persamaan regresi pada penelitian. Terjadi atau tidak terjadinya autokorelasi jika nilai *Durbin-Watson* (DW) adalah $-2 < DW < 2$. Berikut adalah tabel hasil uji autokorelasi:

Tabel 4. 11
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,763 ^a	,582	,564	1,33881	1,420

a. Predictors: (Constant), SIMDA, Good Governance

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: data diolah, 2020.

Berlandaskan tabel 4.11, menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,420. Jadi, dapat disimpulkan bahwa $-2 < DW < 2$ sehingga semua variabel tidak terjadi autokorelasi.

4.4.3 Uji Hipotesis

1. Analisis Regresi Sederhana

Regresi sederhana memperkirakan angka koefisien yang diperoleh dari persamaan linier, dikaitkan pada satu variabel independen, digunakan sebagai alat prediksi besarnya nilai variabel tergantung⁶⁸. Berikut adalah hasil dari koefisien regresi sederhana:

Tabel 4. 12
Koefisien Regresi Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,469	2,073		3,120	,003
	Good Governance	,289	,053	,628	5,475	,000

a. Dependent Variable: Kualitas laporan Keuangan
Sumber: data diolah, 2020.

Pada tabel 4.12 menampilkan persamaan garis regresi dan pengujiannya. Persamaan garis regresi dapat diperoleh dari kolom *Unstandardized Coefisien* (B), sehingga didapat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 6,469 + 0,289X + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut mampu diuraikan sebagai berikut:

1. Hasil dari konstanta adalah 6,469

⁶⁸ Sarwono, *Analisis...*, hal. 116.

2. Hasil koefisien X1 (*good governance*) sebesar 28,9%. Dengan demikian, berarti bahwa bilamana ada kenaikan pada variabel *good governance* sebesar satu tingkat pada *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision*, maka pada variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan akan mengalami peningkatan sebesar 28,9%. Angka bernilai positif, berarti timbul interaksi positif antara *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Analisis Uji Interaksi Variabel Moderating

Pengujian Interaksi variabel *moderating* pada penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Untuk mengetahui besaran nilai variabel *moderating* dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. 13
Hasil Uji Inetraksi

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,628 ^a	,395	,381	1,59388	,395	29,970	1	46	,000
2	,763 ^b	,582	,564	1,33881	,188	20,198	1	45	,000
3	,770 ^c	,593	,566	1,33533	,011	1,235	1	44	,273

a. Predictors: (Constant), Good Governance

b. Predictors: (Constant), Good Governance, SIMDA

c. Predictors: (Constant), Good Governance, SIMDA, product

Sumber: data diolah, 2020.

Pada tabel 4.13 tersebut terdapat tiga jenis model, adapun penjelasan menurut ketiga model tersebut adalah:

- a. Model 1 berisi variabel *good governance*, memiliki nilai *R Square* sebesar 0,395 atau 39,5%. Nilai F sebesar 0,000 ($p < 0,05$), sehingga diartikan bahwa *good governance* dapat memprediksi kualitas laporan keuangan secara signifikan.
- b. Model 2 berisi variabel SIMDA, memiliki nilai *R Square* sebesar 0,582 atau 58,2%. Nilai F sebesar 0,000 ($p < 0,05$), sehingga diartikan bahwa SIMDA dapat memprediksi kualitas laporan keuangan dengan baik secara signifikan.
- c. Model 3 berisi perkalian antara *good governance* dan SIMDA yang berupa *product*. *Product* tersebut memiliki nilai *R Square* sebesar 0,593 atau 59,3%. Nilai F sebesar 0,273 ($p > 0,05$), sehingga diartikan bahwa *product* dapat memprediksi kualitas laporan keuangan dengan baik dan signifikan terlihat karena adanya peningkatan pada nilai F.

Tabel 4. 14
Hasil Uji Interaksi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,469	2,073		3,120	,003
	Good Governance	,289	,053	,628	5,475	,000
2	(Constant)	3,430	1,868		1,836	,073
	Good Governance	,146	,055	,318	2,686	,010
	SIMDA	,218	,049	,533	4,494	,000
3	(Constant)	15,362	10,898		1,410	,166
	Good Governance	-,164	,285	-,357	-,577	,567
	SIMDA	-,099	,290	-,243	-,343	,733
	Good Governance*SIMDA	,008	,007	1,295	1,111	,273

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan
Sumber: data diolah, 2020.

Pada tabel 4.14 tersebut berfokus pada model 3, di mana di dalam model 3 tersebut memuat semua variabel. Adapun persamaan regresi yang diperoleh dari tabel tersebut yaitu:

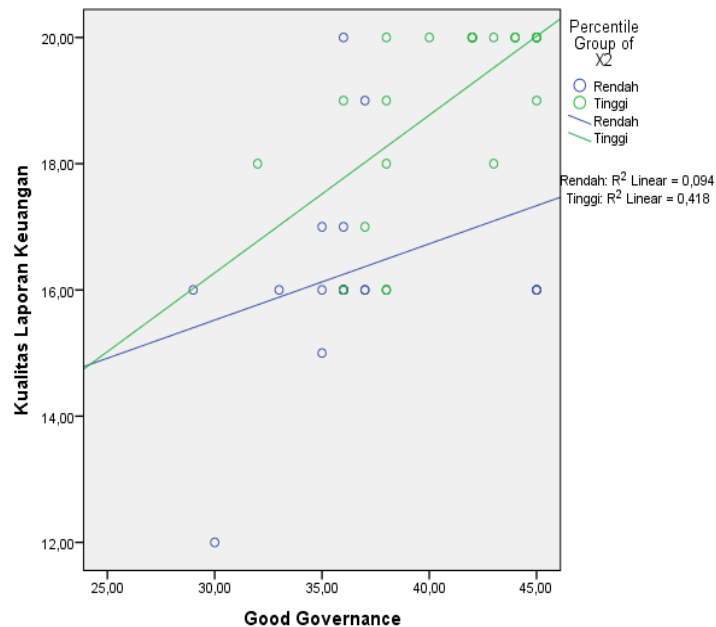
$$Y = 15,362 - 0,164 X1 - 0,099 X2 + 0,008 X1X2 + e$$

Di mana X1 adalah *good governance* dan X2 adalah SIMDA

Untuk membuktikan variabel SIMDA menjadi variabel *moderating* antara *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 4. 3

Grafik Uji Interaksi



Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan grafik pada gambar 4.3 di atas, dijelaskan bahwa garis berwarna biru menunjukkan pengaruh SIMDA rendah, yang artinya apabila ada peningkatan pada *good governance* maka diikuti dengan meningkatnya kualitas laporan

keuangan. Sedangkan garis berwarna hijau menunjukkan pengaruh SIMDA tinggi, yang artinya jika penerapan *good governance* dilakukan secara baik akan diikuti dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tetapi tidak signifikan. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa SIMDA sebagai variabel *moderating*. Dengan demikian, disimpulkan bahwa H_2 diterima yaitu SIMDA *memoderating* pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji F diperlukan untuk melihat pengaruh variabel bebas (X) secara bersamaan terhadap variabel terikat (Y). Uji F mendapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	76,139	1	76,139	29,970	,000 ^b
	Residual	116,861	46	2,540		
	Total	193,000	47			
2	Regression	112,342	2	56,171	31,338	,000 ^c
	Residual	80,658	45	1,792		
	Total	193,000	47			
3	Regression	114,543	3	38,181	21,413	,000 ^d
	Residual	78,457	44	1,783		
	Total	193,000	47			

a. Dependent Variable: kualitas laporan keuangan

b. Predictors: (Constant), Good Governance

c. Predictors: (Constant), Good Governance, SIMDA

d. Predictors: (Constant), Good Governance, SIMDA, Good Governance*SIMDA

Sumber: data diolah, 2020.

Berlandaskan tabel 4.15 di atas, ada dua cara untuk melakukan uji F. Cara yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Diketahui perolehan sig. adalah 0,000. Karena angka sig. $< 0,05$, sehingga H_0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima.
2. Membandingkan nilai F_{hasil} perhitungan dengan F_{tabel} , di mana F_{tabel} dapat dilihat dari tabel F yang tersaji dan dibaca menggunakan rumus.

$$df1 = k-1$$

$$df2 = n-k$$

keterangan:

k = total variabel (independen + dependen)

n = total sampel

Berdasarkan rumus tersebut dapat dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$df1 = 3-1 = 2$$

$$df2 = 48-3 = 45$$

Statistika Uji

$$F_{\text{hitung}} = 21,413$$

$$F_{\text{tabel}} = 3,20$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh angka F_{hitung} yaitu 21,413 dan nilai F_{tabel} yaitu 3,20, sehingga $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, sehingga hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa variabel *good governance* dan SIMDA secara serentak dan signifikan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

4. Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji hipotesis secara parsial diperlukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji parsial juga diperlukan untuk mengetahui signifikansi pada setiap variabel bebas dengan variabel

terikat. Cara mengetahui adanya signifikansi diperoleh dengan melihat angka pada kolom signifikansi (*sig.*). Sedangkan untuk melihat besaran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil t_{hitung} yang ada pada tabel dengan t_{tabel} yang sudah diketahui besarnya. Hasil uji secara parsial dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 16
Hasil Uji Parsial

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,430	1,868		1,836	,073
	Good Governance	,146	,055	,318	2,686	,010
	SIMDA	,218	,049	,533	4,494	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: data diolah, 2020.

Berlandaskan tabel 4.16, menyatakan bahwa:

- a. Pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan
Hasil uji parsial diperoleh t_{hitung} sebesar 2,686 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,679 ($2,686 > 1,679$) dan tingkat signifikansi 0,010 ($0,010 < 0,005$), sehingga dinyatakan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu terdapat pengaruh *good governance* secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Pengaruh SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan
Hasil uji parsial diperoleh t_{hitung} sebesar 4,494 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,679 ($4,494 > 1,679$) dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), sehingga dinyatakan bahwa hipotesis kedua

diterima yaitu terdapat pengaruh SIMDA secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dalam *Moderated Regression Analysis* digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Semakin besar koefisien determinasi yang dihasilkan, maka akan semakin baik variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Tabel perhitungan determinasi (R^2) dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. 17
Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.770 ^a	.593	.566	1.33533

a. Predictors: (Constant), good governance*simda, good governance, simda

Sumber: data diolah, 2020.

Berdasarkan tabel 4.17 di atas, nilai *R Square* sebesar 0,593 atau 59,3 %. Hal tersebut menunjukkan bahwa 59,3% kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh *good governance*. Sedangkan selebihnya yaitu 40,7% diuraikan oleh variabel yang berbeda dan tidak terdapat pada penelitian ini.

4.5 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan di pemerintah Kabupaten Pati mengenai pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan dengan SIMDA sebagai variabel *moderating*. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan hipotesis ini diterima. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwasannya *good governance* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil uji secara parsial diperoleh dari angka signifikansi variabel *good governance* $0,010 < 0,05$, yang berarti variabel *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga semakin baik penerapan *good governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut.

Apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat menerapkan *good governance* dalam pengelolaan keuangan, maka akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat dan masyarakat. Dengan diterapkannya *good governance*, memungkinkan untuk pengelola keuangan lebih taat terhadap aturan yang telah ditentukan dan pastinya memiliki prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila *good governance* benar-benar diterapkan dengan baik dan konsisten akan membuat segala kegiatan OPD dapat berjalan secara efektif dan efisien. Hal tersebut menjadikan informasi dapat diungkapkan secara tepat waktu dan akurat, sehingga akan membawa dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan kualitas laporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Pati.

Saraswati dan Budiasih (2019) mengemukakan bahwasannya *good governance* memberi pengaruh positif pada kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Denpasar. Setelah melakukan penelitian, Maramis dkk (2018) juga menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota Manado. Artinya apabila penerapan *good governance* di Kota Manado semakin baik, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tersebut.

Adanya pengaruh *good governance* terhadap kualitas informasi laporan keuangan secara signifikan juga diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Tua (2015). Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut maka sejalan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Di mana, dalam penelitian ini penerapan *good governance* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Jadi, semakin baik penerapan *good governance*, maka akan semakin bagus dan berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah tersebut.

2. Pengaruh SIMDA memoderating antara *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan

Berlandaskan grafik dari hasil uji *Moderated Regression Analysis* dapat dilihat jika Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *memoderating* pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan. Apabila *good governance* dapat diterapkan secara baik, maka kualitas laporan keuangan meningkat dan SIMDA akan “memperkuat hubungan kedua variabel tersebut. Hal tersebut dikarenakan peran SIMDA sangat penting dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya SIMDA pada setiap dinas di Kabupaten Pati, maka lebih memudahkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk penyusunan laporan keuangan. SIMDA akan menghasilkan informasi keuangan lebih akurat, ekonomis, mudah dipahami dan penyusunan laporan keuangan dapat tepat waktu.

Riawan mengemukakan bahwasannya Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) *memoderating* (2016) hubungan antara sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah. Di mana posisi SIMDA adalah “memperkuat” pengaruh sumber daya manusia terhadap kinerja keuangan daerah. Hasil uji yang kedua yaitu SIMDA juga *memoderating* pengaruh kualitas anggaran terhadap kinerja keuangan daerah. Hal tersebut

membuktikan bahwa SIMDA “memperkuat” hubungan kualitas anggaran terhadap kinerja keuangan daerah. Setelah melakukan penelitian di Kabupaten Sragen, Sari dkk (2017) juga menyatakan jika Sistem Akuntansi Manajemen *memoderating* pengaruh penganggaran partisipatif terhadap kinerja pegawai dan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sistem Informasi Manajemen yang diterapkan di kabupaten Sragen dapat meningkatkan kinerja manajerial pegawai dan SKPD. Sistem informasi akuntansi juga dapat *memoderating* hubungan kemampuan teknik pemakai terhadap kinerja individual pada KSP di Kabupaten Bandung yang diperkuat dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh Acintiawan dan Astika (2019) dari Universitas Udayana.

Berdasarkan ketiga peneliti tersebut, maka penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa SIMDA *memoderating* pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kabupaten Pati. Dengan demikian, SIMDA ”memperkuat” hubungan antara *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara empiris pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Pati. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Hasil uji hipotesis pertama, berlandaskan perolehan uji t menyatakan jika *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kabupaten Pati. Angka tersebut diperhatikan pada besarnya tingkat signifikan yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($5,475 > 1,679$), maka diperoleh kesimpulan bahwasannya H_1 diterima yang berarti secara parsial berpengaruh secara positif dan signifikan antara *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.
2. Hasil uji hipotesis kedua, berlandaskan grafik hasil uji interaksi diperoleh jika garis berwarna biru menunjukkan pengaruh SIMDA rendah, yang artinya apabila ada peningkatan pada *good governance* maka diikuti dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan. Sedangkan garis berwarna hijau menunjukkan pengaruh SIMDA tinggi, yang artinya jika penerapan *good governance* dilakukan secara baik akan diikuti dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan tetapi tidak signifikan. Diperoleh kesimpulan SIMDA *memoderating* pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah di Kabupaten Pati. Hal tersebut berarti SIMDA ”memperkuat” hubungan antara *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti hanya mengambil 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pati yang dianggap cukup mewakili dari 51 Dinas yang ada.
2. Peneliti hanya mengambil satu variabel bebas, sedangkan masih banyak lagi variabel yang bisa berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. oleh karena itu, penelitian ini sekadar memperoleh angka koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 59,3%.

5.3 Saran

Berlandaskan pada pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, sehingga peneliti menyampaikan beberapa saran bersumber pada penelitian yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mengambil sampel lebih banyak lagi sehingga kesimpulan yang dapat diambil lebih representatif.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan lagi variabel bebas sehingga tidak hanya satu variabel bebas yang digunakan, sehingga dapat meningkatkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R²*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Andrian, Dedek, dkk. 2019. *Metodologi dan Aplikasi Statistik*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Armel, Raja Yoga Gustika. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Azlim, dkk. 2012. Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.
- Azzindani, Rahmatia, dkk. 2019. Pengaruh Implementasi SIMDA, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Penerapan Sap Terhadap Kualitas LKPD Lombok Tengah.
- Baihaqi, Imam. Syu'ibul Iman Lilbaihaqi. Bab: Keutamaan Pemimpin yang Adil. Beirut: Maktabah Syamilah.
- Budiman, Fuad dan Fefri Indra Arza. 2013. Pendekatan *Technology Acceptance Model* dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.
- Dwiyanto, Agus. 2014. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: gadjah Mada University Prees.
- Echdar, Saban. 2017. *Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Herawati, Tuti dan Defi Nopianti. 2017. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- IHPS II TAHUN 2014.
- Karsana, I Wayan dan I Gusti Ngurah Agung Suaryana. 2017. Pengaruh Efektivitas Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPI pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli.

- Kementrian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an & Tafsirnya*. Jilid I. Juz 1-3. Jakarta: Widya Cahaya.
- Kuncoro, Mudrajad. 2018. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Liana, Lie. 2009. Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen.
- Lupiyoadi, Rambat dan Ridho B. 2015. *Praktikum metode Riset Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudi. 2016. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mamang S., Eta Dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Martono, Nanang. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Megarani, Novia, dkk. 2019. The Effect of Tax Planning, Company Value, and Leverage on Income Smoothing Practices in Companies Listed on Jakarta Islamic Index.
- Moha, Febriyani, dkk. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- Muhammadong. 2017. *Good Governance dalam Perspektif Hukum Islam*. Makassar: Edukasi Mitra Grafika.
- Nazrin, Putra Mhd. 2017. Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Nugraha, Harmadhani Adi, dan Yuli Widi Astuti. 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk).

- Nugroho, Eko. 2018. *Prinsip-Prinsip Menyusun Kuesioner*. Malang: UB Press.
- Oktarina, Mia, dkk. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
- Pujanira, Putriasri dan Abdullah Taman. 2017. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.
- Purnawati, Rizky Ages dkk. 2018. Pengaruh Keahlian, Program pelatihan dan Pendidikan, Ukuran Organisasi, dan Formalisasi Pengembangan Sistem Terhadap Kinerja Sistem Informasi akuntansi (Studi Kasus PT Kusumahadi Santosa di Karanganyar).
- Riawan. 2016. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang Dimoderasi dengan SIMDA pada SKPD Kabupaten Buton Utara.
- Sari, Diana. 2012. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Sihite, Renny Novsellia dan Holiawati. 2017. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, SPI, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Sari, Ika Maya dan Nur Arvah Tamrin. Pengaruh *Good Government Governance* dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan”, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO*.
- Sarwono, Jonathan. 2006. Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.

- Suprihatin, Neneng Sri dan Arinda Ayu Ananthi. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Tua, Manuppan Bangun. 2015. Pengaruh *Good Governance*, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian intern Terhadap Kualitas Informasi laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai).
- Warno. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Infak dan Shodaqoh (ZIS) dalam Penerapan UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 pada Lembaga Pengelola Zakat.
- Wibisono, Arif Fajar. 2017. Efektivitas Peran BPKP dalam Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).
- Yang, M Rayindha Prasatya, dan I Wayan Suartana. 2017. Pengaruh Good Governance, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kinerja Pemerintah Daerah.
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

(Senin, 20 Januari 2020 pukul 21.00)

<https://makassar.tribunnews.com/2019/10/21/ini-harapan-ketua-muhammadiyah-sulbar-kepada-jokowi-maruf/>

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SIMDA SEBAGAI VARIABEL *MODERATING* PEMERINTAH DI KABUPATEN PATI

Kepada Yth:

Bapak / Ibu Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi di Jurusan Akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "**Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan SIMDA Sebagai Variabel *Moderating* Pemerintah di Kabupaten Pati**". Bersama ini mohon berkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Wijayanti

KUESIONER PENELITIAN

NAMA :

INSTANSI :

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : a. Laki-Laki, b. Perempuan
2. Pendidikan Terakhir : a. SMA c. S2
b. S1 d. S3
3. Lama Bekerja : a. < 1Tahun, b. 1-< 5 Tahun, c. 5-< 10 Tahun,
d. 10-< 15 Tahun, e. \geq 15 Tahun
4. Usia Anda Saat Ini : a. < 25 Tahun, c. 25-< 35 Tahun,
b. 35-< 45 Tahun, d. \geq 45 Tahun

II. PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon memberi tandacentang/ contreng (\surd) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.
2. Setelah mengisi keusioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan kembali kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.
3. Keterangan Alternatif jawaban dan skor:
 - a. SS = Sangat Setuju Nilai Skor = 5
 - b. S = Satuju Nilai Skor =4
 - c. N = Netral Nilai Skor =3
 - d. TS = Tidak Setuju Nilai Skor =2
 - e. STS = Sangat Tidak Setuju Nilai Skor =1

A. GOOD GOVERNANCE (X₁)

No	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Pati bebas menggunakan haknya dalam berpendapat, bersuara dalam perumusan kebijakan , baik secara langsung maupun tidak langsung.					
2.	Dalam mencapai <i>good governance</i> pemerintah Kabupaten Pati menggunakan dasar hukum yang adil.					
3.	Informasi yang berkaitan dengan pemerintahan Kabupaten Pati dapat diperoleh dengan mudah secara langsung oleh mereka yang membutuhkan.					
4.	Pelayanan di Pemerintahan Kabupaten Pati cepat dan tanggap dalam melayani <i>stake holder</i> .					
5.	Pemerintahan Kabupaten Pati berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih kuat.					
6.	Setiap pegawai di Pemerintahan Kabupaten Pati memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.					
7.	Terselenggaranya kegiatan di Pemerintahan Kabupaten Pati dengan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan murah.					
8.	Pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintahan di Kabupaten Pati.					
9.	Pemerintahan di Kabupaten Pati mempunyai strategi khusus dalam mencapai secara maksimal visi dan misi.					

B. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) (X₂)

No.	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Aplikasi SIMDA dapat melakukan pengolahan data dengan cermat					
2.	Aplikasi SIMDA dalam pengolahan data					

	menghasilkan laporan keuangan yang benar					
3.	Aplikasi SIMDA menghasilkan Informasi yang dapat dipercaya					
4.	Aplikasi SIMDA mudah digunakan dalam penyusunan laporan keuangan					
5.	Anda tidak memerlukan banyak pikiran dan tenaga dalam mengoperasikan aplikasi SIMDA					
6.	Tidak ada kesulitan bagi anda untuk menggunakan aplikasi SIMDA					
7.	Aplikasi SIMDA memudahkan dan memperlancar pekerjaan anda					
8.	Aplikasi SIMDA meminimalkan hilangnya informasi dalam penyusunan laporan keuangan					
9.	Aplikasi SIMDA dapat meningkatkan kinerja anda					

C. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Y)

No.	Daftar Pertanyaan	Alternatif Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1.	Laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Pati mampu mengevaluasi kesalahan masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa mendatang.					
2.	Laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Pati bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi.					
3.	Laporan keuangan di pemerintah Kabupaten Pati dapat dibandingkan dengan periode yang sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain pada umumnya.					
4.	Informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pati dapat dipahami oleh pengguna dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.					

LAMPIRAN II

1. *Good Governance* (X1)

GG1	GG2	GG3	GG4	GG5	GG6	GG7	GG8	GG9	JUMLAH
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
4	5	5	5	5	5	5	5	5	44
5	4	4	4	4	4	4	4	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
2	4	3	5	4	5	4	3	5	35
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	4	4	2	4	5	5	4	38
5	5	4	4	2	5	4	5	4	38
5	5	4	4	2	5	5	5	5	40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	3	4	3	4	3	3	3	3	30
5	3	3	3	3	3	3	3	3	29
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
5	4	4	5	4	4	4	4	4	38
4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
3	3	4	4	4	4	2	4	4	32
4	4	4	4	4	4	3	4	4	35
5	4	4	4	5	4	4	4	4	38
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	4	4	4	4	4	4	4	38
4	4	4	4	4	4	4	4	3	35
4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	4	4	4	4	5	5	4	3	38
4	4	4	3	4	3	4	4	3	33
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	3	5	5	4	5	5	5	42

4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	4	4	4	5	5	5	5	42
5	5	4	4	4	5	5	5	5	42
5	5	4	4	4	5	5	5	5	42
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	4	5	5	5	5	5	5	5	43
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	5	5	5	4	4	5	5	43
5	5	4	5	4	5	5	5	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36

2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) (X2)

S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	JUMLAH
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	4	5	4	4	4	4	4	5	39
4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
4	4	4	4	4	4	5	4	5	38
4	4	4	4	2	4	4	4	4	34
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	5	5	5	4	5	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	1	3	4	4	4	36
4	4	4	4	1	2	3	3	3	28
4	4	4	4	1	1	3	3	3	27
4	5	5	4	2	3	4	4	4	35
4	5	5	4	2	3	4	4	4	35
4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
4	5	5	5	5	5	4	4	4	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	5	5	5	4	4	4	4	39

5	5	4	4	4	3	4	4	4	37
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	5	5	5	5	5	41
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	3	4	4	4	4	35
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	3	3	4	4	4	34
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	2	4	5	5	5	41
5	5	5	5	2	4	3	3	3	35
5	5	5	5	2	4	5	5	5	41
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	2	4	4	4	5	39
4	4	4	3	2	4	4	3	4	32
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
5	5	5	5	4	5	5	5	5	44
5	4	5	5	2	4	4	4	4	37

3. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

K1	K2	K3	K4	JUMLAH
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	5	4	4	17
4	4	4	4	16
5	4	4	4	17
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
5	5	5	4	19

5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
3	3	3	3	12
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	5	5	18
4	5	5	5	19
5	5	4	4	18
4	4	5	4	17
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	3	4	4	15
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
5	5	5	5	20
5	4	5	5	19
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20
4	5	5	5	19
5	5	5	5	20
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	4	4	4	16
4	5	5	4	18
5	5	5	5	20
5	5	5	5	20

X1.6	Pearson										
	Correlation	,277	,741**	,562**	,738**	,305*	1	,759**	,668**	,768**	,831**
	Sig. (2-tailed)	,056	,000	,000	,000	,035		,000	,000	,000	,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.7	Pearson										
	Correlation	,519**	,837**	,515**	,624**	,322*	,759**	1	,728**	,652**	,858**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,026	,000		,000	,000	,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.8	Pearson										
	Correlation	,498**	,808**	,618**	,592**	,266	,668**	,728**	1	,688**	,838**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,068	,000	,000		,000	,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X1.9	Pearson										
	Correlation	,221	,746**	,558**	,786**	,475**	,768**	,652**	,688**	1	,848**
	Sig. (2-tailed)	,131	,000	,000	,000	,001	,000	,000	,000		,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
Good Governance	Pearson										
	Correlation	,522**	,881**	,762**	,839**	,574**	,831**	,858**	,838**	,848**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

X2.8	Pearson Correlation	,626**	,606**	,569**	,660**	,643**	,760**	,899**	1	,857**	,906**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000	,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
X2.9	Pearson Correlation	,622**	,524**	,537**	,540**	,617**	,765**	,946**	,857**	1	,881**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
SIM DA	Pearson Correlation	,741**	,707**	,710**	,775**	,763**	,887**	,893**	,906**	,881**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

c. Kualitas Laporan Keuangan

		Correlations				Kualitas Laporan Keuangan
		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	
Y.1	Pearson Correlation	1	,765**	,754**	,780**	,896**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	48	48	48	48	48
Y.2	Pearson Correlation	,765**	1	,803**	,765**	,910**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	48	48	48	48	48
Y.3	Pearson Correlation	,754**	,803**	1	,898**	,939**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	48	48	48	48	48
Y.4	Pearson Correlation	,780**	,765**	,898**	1	,935**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000

	N	48	48	48	48	48
Kualitas Laporan Keuangan	Pearson Correlation	,896**	,910**	,939**	,935**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	48	48	48	48	48

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji reliabilitas

a. Good Governance

Cronbach's Alpha	N of Items
,911	9

b. SIMDA

Cronbach's Alpha	N of Items
,909	9

c. Kualitas laporan keuangan

Cronbach's Alpha	N of Items
,939	4

LAMPIRAN IV



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kolonel Sugiono No. 77 PATI Kode Pos 59113
Telepon : (0295) 383231 website : -
Faksimile : (0295) 384324 email : kesbangpol@patikab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/026/26.2/2020

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Islam tanggal 17 Febuari 2020 nomor : B-609/Un.10.5/D.1/TL.00.9/02/2020 perihal Permohonan Rekomendasi.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : Wijayanti
2. Alamat : Desa Kalimulyo RT 004 RW 001 Kec. Jakenan Kab. Pati
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : **Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Simda Sebagai Variabel Moderating Pemerintah Di Kabupaten Pati**
- b. Tempat / lokasi : Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
- c. Bidang Penelitian : Ekonomi Bisnis
- d. Waktu Penelitian : 25 Febuari 2020 s/d selesai
- e. Penanggung Jawab : Nur Fatoni
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Ketentuan yang harus ditaati adalah:

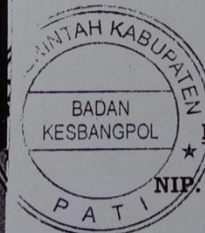
- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat/ Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pati;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat Rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Pati, 25 Februari 2020

Pt KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PATI
Sekretaris



Drs. SUSANTO, MM

Pembina Tk. I

NIP. 196301141994031003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Wijayanti
Tempat, tanggal Lahir : Pati, 27 September 1997
Alamat Asal : Desa Kalimulyo RT/RW 04/01, Kec. Jakenan, Kab. Pati.
Alamat Sekarang : Desa Tanjungsari RT/RW 07/05, Kec. Ngaliyan, Kel. Tambakaji.
No. Telp : 081325300843
Email : wija2858@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. SD N Kalimulyo 02 (Tahun 2004 s/d tahun 2010)
2. SMP N 1 Jakenan (Tahun 2010 s/d tahun 2013)
3. SMA N 1 Jakenan (Tahun 2013 s/d tahun 2016)
4. UIN Walisongo Semarang (Tahun 2016 s/d sekarang)

Semarang, 17 April 2020

Penulis,

WIJAYANTI

NIM. 1605046045